

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai salah satu pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, Desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk *mengaktualisasikan* kepentingannya guna menjawab *kebutuhan kolektif* masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten atau Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota menyerahkan sepenuhnya kepada Desa mengenai pelaksanaan pembangunan Desa. Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa Desanya ke arah yang dikehendakinya. Karena Kepala Desa merupakan pemimpin dari masyarakat yang ada di suatu Desa.

Dalam hal ini, Pemerintah Desa berhak merencanakan pembangunan Desa untuk kemajuan Desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten atau Kota. Pembangunan pedesaan sebagaimana yang dimaksud disusun oleh Pemerintah Desa dan partisipasi seluruh masyarakat Desa. Dalam pembangunan Desa, pemerintah dan masyarakat Desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah dan masyarakat Desa adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan Desa. Jadi pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terlaksananya pembangunan Desa.

Pembangunan Desa atau *rural development* merupakan pembangunan yang mengusahakan pembangunan masyarakat sekaligus lingkungan hidupnya. Pembangunan Desa bukan saja berfokus pada lingkungan hidup masyarakat Desa, tetapi dalam pengertian yang lebih luas yaitu pembangunan pada kualitas hidup masyarakat yang di terapkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat Desa.

Mengikuti kaidah klasik yang menjadi fondasi kesepakatan fungsi manajemen, maka setiap kegiatan manusia, khususnya yang melembaga, harus dirancang, diorganisasikan, dipimpin dan dikendalikan. Perencanaan adalah sebuah dinamik pertama yang menentukan hendak “ di bawa ke mana “ kegiatan bersama tersebut. Dinamik kedua adalah pengorganisian di dalam arti menata aturan main, struktur dan personal yang mengisi struktur dan menjalankan aturan main tersebut. Di atas semuanya adalah Pemimpin yang memimpin implementasi aransemen yang sudah disusun. Terakhir, agar terjadi konsistensi implementasi fungsi dari perencanaan pengorganisasian kepemimpinan, maka diperlukan pengendalian¹.

Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan

¹Lihat. Djokosantoso, Moeljono. 2003.*Beyond Leadership 12 Konsep Kepemimpinan*. (Jakarta : PT. Media Komputindo). hlm. 27.

penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi, demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian².

Pemerintahan desa merupakan simbol formal kesatuan masyarakat Desa. Fungsi Pemerintahan Desa adalah sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang mengatur rumah tangga sendiri, juga memiliki wewenang sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan dari pemerintah tingkat atasnya. Sehingga terbinanya administrasi Desa sangat berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintahan Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat Desa baik hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam organisasi pemerintahan Desa, Kepala Desa merupakan pemegang kendali tertinggi. Di satu pihak dia juga sebagai pelaksanaan instruksi yang berasal dari pemerintah tingkat atas Desa, selain itu Kepala Desa juga bisa

²Lihat. Darwito , *Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*, Program Studi Magister manajemen, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2008. hlm 18.

dianggap sebagai sesepuh Desa yang mengemban tugas kepemimpinan di bidang sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat³.

Selain Pemerintah Desa, terdapat juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra adalah Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan Masyarakat. Salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM yang dulunya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Tugas umum yang dimiliki oleh LPM adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat untuk bergotong royong, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pembangunan dimaksud adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik ekonomi, politik, sosial budaya dan lainnya di Desa. Sehingga salah satu ukuran keberhasilan dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan yang dijalankan oleh LPM dimulai proses penyusunan program atau perencanaan, penyelenggaraan hingga pengukuran keberhasilan pembangunan. Akan tetapi, besarnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga ikut ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat harus dijadikan sebagai obyek sekaligus subjek.

³ Lihat. Dhiassari Paminta Resti, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Pedesaan*. Volume 1, nomor 2, 2010. hlm. 7.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa. Sebagai pemimpin, Kepala Desa memiliki kekuasaan tertentu dan memiliki semacam kontrol sosial terhadap anggota-anggota masyarakatnya. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan Desa di mana Kepala Desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan tugas urusan pembangunan PP 72 Th 2005. Pemimpin formal itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di Desa. Agar program pemerintah efektif maka perlu adanya Kepemimpinan Kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Desa⁴. Desa Jatimulya merupakan hasil pemekaran dari Desa Bongo 1 dan Desa Jatimulya diresmikan pada tahun 2003. Di Desa Jatimulya terdapat IV dusun dengan jumlah penduduk sekitar 1125 jiwa atau sekitar 425 KK, yang terdiri dari berbagai suku. Masyarakat di Desa Jatimulya mayoritas bekerja sebagai petani padi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat (Suatu Penelitian di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo)”***.

⁴Lihat. Richard O.K. Tinjauan tentang Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. hlm. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2013. hlm. 2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang di angkat dalam objek penelitian adalah seberapa besar pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Jatimulya terhadap Partisipasi Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Jatimulya terhadap Partisipasi Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk meningkatkan kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat.
2. Manfaat Praktis, untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam meneliti Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat.